

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perbankan dalam suatu negara merupakan salah satu agen pembangunan (*agent of development*). Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan.<sup>1</sup> Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>2</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 terdapat dua jenis perbankan yang berkembang di Indonesia, yaitu bank umum dan bank pengkreditan rakyat. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya terdapat dua alternatif pelaksanaan yaitu secara konvensional dan secara prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

---

<sup>1</sup> Trisandi P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 1

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah adalah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)<sup>3</sup>

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>4</sup> Pada dasarnya fungsi bank syariah secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan.<sup>5</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bank umum diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu melalui pembukaan Unit Usaha Syariah. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (UU No. 21 Tahun 2008)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 5.

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 36

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Pemberlakuan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 ini merupakan momen pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut membuka kesempatan untuk pengembangan jaringan syariah (KCS) oleh bank konvensional. Dengan kata lain, bank konvensional dapat melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal bank umum melakukan kegiatan usaha berdasarkan syariah, maka kegiatan tersebut dilakukan dengan membuka satuan kerja dan kantor cabang khusus, yaitu Unit Usaha Syariah dan Kantor Cabang Syariah.<sup>7</sup> Perkembangan yang pesat tercatat sejak dikeluarkannya ketentuan Bank Indonesia yang memberi izin untuk pembukaan bank Islam yang baru maupun izin kepada bank konvensional untuk mendirikan suatu unit usaha Islam (UUS), semenjak itu bank Islam tumbuh dimana-mana seperti jamur di musim hujan.<sup>8</sup>

Bank konvensional yang membuka Unit Usaha Syariah (UUS) salah satunya ialah Bank Tabungan Negara (BTN). BTN Syariah mulai beroperasi pada tanggal 14 Februari 2005 melalui pembukaan Kantor Cabang Syariah pertama di Jakarta. Pembukaan SBU ini guna melayani tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan jasa keuangan Syariah dan memperhatikan keunggulan prinsip Perbankan Syariah, adanya Fatwa MUI tentang bunga bank, serta melaksanakan hasil RUPS tahun 2004.<sup>9</sup>

Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah yang merupakan pelaku kegiatan perbankan juga melakukan kegiatan menghimpun dana, menyalurkan dana, dan

---

<sup>7</sup> Wirdyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), hlm. 56.

<sup>8</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010). hlm. 132.

<sup>9</sup> [www.btn.co.id](http://www.btn.co.id)

memberikan pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Penyaluran dana pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah melalui produk pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan Multijasa BTN iB. Multijasa BTN iB merupakan pembiayaan yang dapat digunakan untuk keperluan mendanai berbagai kebutuhan layanan jasa bagi Nasabah seperti: Paket biaya pendidikan, Paket biaya pernikahan, Paket biaya *travelling* (perjalanan wisata), Paket biaya umroh/haji plus, Paket biaya kesehatan, Paket biaya jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

Pembiayaan Multijasa BTN iB Menggunakan Akad *kafālah* dengan konsep Bank sebagai penanggung/penjamin jasa layanan yang diselenggarakan penyelenggara layanan jasa atau pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban yang ditanggung nasabah dalam rangka mengambil manfaat dari layanan jasa tersebut sesuai kebutuhan. Atas manfaat dari layanan jasa yang dipilih, Nasabah membayar *ujroh* (*fee*) sesuai ketentuan Bank.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.<sup>10</sup> Sebagai pihak yang menerima dana, nasabah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut kepada bank dengan jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan (akad), sedangkan bank berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat juga mendapatkan imbalan berupa *ujrah*, atau bahkan tidak mendapatkan imbalan sama sekali atau mendapatkan bagi hasil dari dana yang telah disalurkaninya tersebut.

---

<sup>10</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 160.

*Kafālah* menurut bahasa berarti *al-dhamān* (jaminan), *hamalah* (beban), *za'āmah* (tanggungan).<sup>11</sup> Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan *kafālah* adalah penjaminan seseorang terhadap orang lain yang berkenaan dengan jiwa, hutang, atau zat benda.

Akad *kafālah*, menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 11/DSN/MUI/IV/2000 yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafīl*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfūl anhu, ashīl*). Atas dasar pengertian tersebut, setidaknya ada tiga hal yang dikandung oleh *kafālah*, yaitu: kesanggupan untuk memenuhi hak yang menjadi kewajiban orang lain, kesanggupan mendatangkan barang yang ditanggung, dan kesanggupan menghadirkan orang yang mempunyai kewajiban terhadap orang lain.<sup>12</sup>

Dewan Syari'ah Nasional telah menfatwakan hukum pembiayaan multijasa didalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 44/DSN/MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa adalah boleh (*jaiz*) dengan syarat harus menggunakan akad *ijārah* atau *kafālah*. Lembaga Keuangan boleh memperoleh imbalan jasa (*ujroh*) atau *fee* dari jasa yang diberikan kepada nasabah dengan ketentuan besaran *ujroh* tersebut harus disepakati di awal akad dan harus dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase. *Ujr* atau *fee* yaitu imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Akad *ujr* dalam praktek perbankan syariah banyak diaplikasikan dalam produk-produk jasa

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 187.

<sup>12</sup> Atang Abd.Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 277.

keuangan bank syariah, seperti penyewaan *safe deposit box*, penggunaan ATM dan sebagainya.<sup>13</sup>

Pelaksanaan pembiayaan Multijasa BTN iB menggunakan akad *kafālah* yang disertai dengan *ujrah* (*kafālah bil ujrah*), dimana bank bertindak sebagai penjamin bagi pihak kedua (nasabah) dan pemberi dana bagi pihak ketiga (instansi yang bersangkutan). Prosedur dan mekanisme pada produk pembiayaan Multijasa BTN iB ini diantaranya pada saat pencairan dana, dimana dari salah satu jenis pembiayaan Multijasa BTN iB yakni biaya pendidikan, dana langsung diberikan kepada pihak ketiga (instansi yang bersangkutan).

Maksimal pembiayaan yang diberikan sebesar 75 juta. Pengembalian pinjaman pada pembiayaan Multijasa BTN iB adalah minimum 6 bulan dan maksimum 5 tahun (tidak melampaui umur pensiun nasabah) dari jangka waktu pembiayaan. *Ujrah* pada pembiayaan Mutijasa BTN iB ini telah ditetapkan oleh BTN Syariah dalam bentuk nominal sesuai dengan besarnya pembiayaan yang diberikan dan jangka waktunya.

*Ujrah* yang ditetapkan dalam pembiayaan multijasa BTN iB tidak ada perbedaan atau sama untuk semua jenis pembiayaan yang ada dalam produk pembiayaan multijasa BTN iB.

Perhitungan penetapan *ujrah* yang digunakan oleh Bank Tabungan Negara (BTN) KCPS Surapati Core Bandung menggunakan perhitungan efektif. Berdasarkan risalah rapat ALCO tanggal 17 Mei 2017, direksi telah menyetujui

---

<sup>13</sup> Ascaraya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 110

penyesuaian margin/ *ujrah* dan jangka waktu pembiayaan multijasa BTN iB dan multimanfaat BTN iB.

Tabel 1.1  
*Ujrah Pembiayaan Multijasa BTN iB*

Jangka Waktu (Th)	Margin/ Ujroh Eksiting (% P.a efektif)	Margin/ Ujroh Baru (% P.a efektif)
1	13,04%	12,75%
2	13,75%	13,00%
3	15,25%	13,25%
4	15,75%	13,50%
5	16,25%	13,75%
6		14,00%
7		14,25%
8		14,50%
9		14,75%
10		15,00%

(terlampir perhitungan simulasi angsuran multijasa BTN iB dan multimanfaat BTN iB)

Berikut simulasi angsuran pembiayaan multijasa BTN iB

Tabel 1.2  
*Simulasi angsuran pembiayaan multijasa BTN iB*

Plafond Pembayaran	Jangka Waktu (Tahun)				
	1	2	3	4	5
10,000,000	892,000	475,418	338,145	270,763	231,388
20,000,000	1,784,000	950,837	676,291	541,527	462,777
30,000,000	2,676,000	1,426,255	1,014,255	812,290	694,165
40,000,000	3,568,000	1,901,673	1,352,581	1,083,053	925,553
50,000,000	4,460,000	2,377,092	1,690,726	1,353,817	1,156,942
60,000,000	5,352,000	2,852,510	2,028,872	1,624,580	1,388,330
70,000,000	6,244,000	3,327,928	2,367,017	1,895,343	1,619,718
80,000,000	7,136,000	3,803,347	2,705,162	2,166,107	1,851,107
90,000,000	8,028,000	4,278,765	3,043,308	2,436,870	2,082,495
100,000,000	8,920,000	4,754,183	3,381,453	2,707,633	2,313,883
110,000,000	9,812,000	5,229,602	3,719,598	2,978,397	2,545,272
120,000,000	10,704,000	5,705,020	4,057,743	3,249,160	2,776,660
130,000,000	11,596,000	6,180,438	4,395,889	3,519,923	3,008,048
140,000,000	12,488,000	6,655,857	4,734,034	3,790,687	3,239,437
150,000,000	13,380,000	7,131,275	5,072,179	4,061,450	3,470,825

**Catatan:**

a. **Perhitungan *fee/ujroh* Multijasa BTN iB:**

Plafond =Rp.100 Juta

Jangka Waktu	=10 Tahun
Angsuran Pokok	=Rp.833.333,- per bulan
Angsuran <i>fee/ujroh</i>	=Rp.780.071,- per bulan
Total Angsuran	=Rp.1.613.350,- per bulan

**b. Perhitungan simulasi angsuran Multijasa BTN iB maksimal plafond Rp.150 juta.**

Akad *kafālah* termasuk kedalam akad *tabarru* yang merupakan perjanjian atau transaksi yang tidak ditujukan untuk memperoleh laba (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Tujuan dari transaksi ini adalah tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Akan tetapi, pihak yang berbuat kebaikan tersebut diperbolehkan meminta imbalan untuk sekedar menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan agar dapat terlaksananya akad tersebut.<sup>14</sup> Namun berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 44/DSN/MUI/VII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa diperbolehkan memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) besaran *ujrah* atau *fee* harus dalam bentuk nominal dan bukan prosentase. Akan tetapi, pada pelaksanaan pembiayaan Multijasa BTN iB dalam menetapkan *ujrah* nya berdasarkan prosentase walaupun terlampir besaran *ujrah* dalam bentuk nominal besaran *ujrah* yang ditetapkan hanya dimulai dari plafond Rp.10.000.000., dan selain dikenakan *ujrah* atau *Fee* yang apabila masa angsurannya semakin lama *ujrah/fee* tersebut pun semakin tinggi, selain itu nasabah pun dikenakan biaya biaya lainnya diluar *ujrah/fee* tersebut, yaitu biaya administrasi, biaya asuransi

---

<sup>14</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 66.



jiwa, premi asuransi kebakaran/ *all risk* untuk agunan tambahan sesuai dengan jenis agunan yang diberikan, dan biaya notaris.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian: “Pelaksanaan Akad *Kafālah bil Ujrah* pada Produk Pembiayaan Multijasa BTN iB di PT. Bank Tabungan Negara (BTN) KCPS Surapati Core Bandung Menurut Hukum Ekonomi Syariah”.

## **B. Rumusan Masalah**

Pelaksanaan pembiayaan Multijasa BTN iB ini berdasarkan pada fatwa DSN nomor 44 tahun 2004 mengenai Multijasa. Karena pada pembiayaan Multijasa di BTN KCPS Bandung menggunakan akad *kafālah* maka pelaksanaan *ujrah* pada pembiayaan Multijasa BTN iB ini mengikuti ketentuan yang ada pada akad *kafālah* yang diatur dalam fatwa DSN nomor 11 tahun 2000 dan *ujrah* harus dalam bentuk nominal bukan prosentase. Akan tetapi, pada pelaksanaan pembiayaan Multijasa BTN iB dalam penetapan *ujrah* nya berdasarkan prosentase, apabila masa angsurannya semakin lama *ujrah/fee* tersebut pun semakin tinggi. Selain itu nasabah pun dikenakan biaya biaya lainnya yaitu biaya administrasi, biaya asuransi jiwa, premi asuransi kebakaran/ *all risk* untuk agunan tambahan sesuai dengan jenis agunan yang diberikan, dan biaya notaris.

Berdasarkan inti masalah diatas, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan Multijasa BTN iB di Bank BTN KCPS Bandung ?

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Agus Darmawan, *Sub Branch Manajer*, Bandung, 17 November 2017.

2. Bagaimana kebijakan bank dalam menentukan *ujrah* pada pembiayaan Multijasa BTN iB di Bank BTN KCPS Bandung ?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembiayaan Multijasa BTN iB di Bank BTN KCPS Bandung kaitannya dengan fatwa DSN-MUI NO: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Kafālah* ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan Multijasa BTN iB di Bank BTN KCPS Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan bank dalam menentukan *ujrah* pada pembiayaan Multijasa BTN iB di Bank BTN KCPS Bandung.
3. Untuk mengetahui hukum ekonomi syariah terhadap pembiayaan Multijasa BTN iB di Bank BTN KCPS Bandung kaitannya dengan fatwa DSN-MUI NO: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Kafālah*.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Secara Teoritis**

Bagi Akademi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

#### **2. Secara Praktis**

a. Bagi Perusahaan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan-masukan bagi perusahaan dan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi.

b. Bagi Penulis

Untuk mengetahui penerapan teori yang didapatkan di perkuliahan dalam prakteknya dan bisa lebih memperdalam pengetahuan serta pengalaman di bidang perbankan

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Studi Terdahulu

Studi terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian, karena penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan beberapa studi terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Pertama : Desycha Yusianti,<sup>16</sup> Vol. 07, No. 01, Juni 2017, *Penggunaan Akad Kafālah Bi Al- Ujrah Pada Pembiayaan Take Over Perspektif Hukum Islam*. Penelitian ini membahas mengenai mekanisme akad *kafālah bi al- 'ujrah* pada pembiayaan take over. Dalam penelitian disimpulkan bahwasanya penggunaan akad *kafālah bil 'ujrah* pada pembiayaan take over yang dilakukan

---

<sup>16</sup> Desycha Yusianti, "*Penggunaan Akad Kafalah Bi Al- 'Ujrah Pada Pembiayaan Take Over Perspektif Hukum Islam*", (Internet Resources), diakses 4 Desember 2017 melalui <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0ahUKEwiuku6bvvdXAhUN2o8KHVWpCC0QFghRMAY&url=http%3A%2F%2Fjurnal.fsh.uinsby.ac.id%2Findex.php%2Fmaliyah%2Farticle%2Fdownload%2F452%2F399%2F&usg=AOvVaw33-SmuklHPa0IeXmUH-QQq>

oleh BMT UGT Sidogiri Capem Sukorejo tidak sah karena tidak terpenuhinya persyaratan dalam akad *kafālah*, yaitu dilakukan tanpa kehadiran dan tanpa sepengetahuan *makfūl lahu* (lembaga yang bersangkutan). Di sisi lain, penggunaan *akad kafālah bil ujah* pada pembiayaan take over ini juga tidak sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 31/DSNMUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Hutang karena akad *kafālah bi al-ujrah* tidak termasuk ke dalam 4 alternatif akad yang dapat digunakan untuk pembiayaan take over (pengalihan hutang) yang telah disebutkan dalam fatwa tersebut. Selain itu, dalam hal *ujrah* seharusnya bersifat sukarela dan tidak boleh ditentukan karena akad kafalah merupakan akad *tabarru'*.

Kedua : Muslimah Anna Sari. D<sup>17</sup>, *Implementasi Ujah Pada Produk Pembiayaan Multijasa BTN iB Menurut Perspektif Ekonomi Islam (studi kasus pada BTN Syariah Cabang Pekanbaru)*. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan dan mekanisme pada produk pembiayaan Multijasa BTN iB yang pada saat pencairan dana, dana langsung diberikan kepada nasabah (pihak kedua) bukan kepada pihak ketiga (instansi) sehingga menurut penelitian tersebut tugas bank sebagai penjamin dan pemberi dana pada pihak ketiga tidak ada (hilang), maka rukun dan syarat yang ada pada *akad kafālah* tidak terpenuhi dan *ujrah* yang diterima pun tidak jelas perolehannya darimana. Adapun Konsep *ujrah* pada produk pembiayaan Multijasa BTN iB di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Cabang Pekanbaru, *ujrah* yang dipakai berdasarkan Surat Edaran Direksi (SED) yang diterbitkan oleh kantor pusat

---

<sup>17</sup> Muslimah Anna Sari, D, “*Implementasi Ujah Pada Produk Pembiayaan Multijasa BTN iB Menurut Perspektif Ekonomi Islam (studi kasus pada BTN Syariah Cabang Pekanbaru)*”, (Internet Resources), diakses 4 Desember 2017 melalui <http://repository.uin-suska.ac.id/6425/>.

Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah pusat yang berlokasi di Jakarta, dimana *ujrah* yang diterbitkan berdasarkan surat edaran direksi dalam bentuk tabel. Dan implementasi *ujrah* pada produk pembiayaan multijasa ini berdasarkan akad *kafālah bil ujah*.

Ketiga : Jessie Sa'adatul Mardiyah, *Pelaksanaan Pembiayaan Ijārah Multijasa Di BPRS Harum Hikmah Nugraha Garut*, dalam penelitian ini membahas mengenai mekanisme dan pelaksanaan pembiayaan *ijārah* multijasa, dan analisis hukum ekonomi syariah terhadap pembiayaan *ijārah* multijasa di BPRS Harum Hikmah Nugraha kaitannya dengan fatwa DSN MUI tentang *Ijārah*. Penelitian ini juga membahas mengenai alasan pembiayaan *ijārah* multijasa tanpa penyebutan spesifikasi objek sewa, karena jika disebutkan spesifikasinya secara jelas terlalu berlebihan dan tidak mungkin semuanya harus dituliskan karena pihak bank hanya membantu nasabahnya yang membutuhkan dana.

Berikut persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan peneliti diatas:

Tabel 1.3  
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

Nama dan Judul Penelian	Persamaan	Perbedaan
Desycha Yusianti, Vol 07, No 01, Juni 2017, Penggunaan Akad <i>Kafālah Bi Al-Ujah</i> Pada Pembiayaan Take Over Persoektif Hukum Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya	Akad yang diteliti dalam penilitian sama-sama menggunakan akad <i>kafālah bil ujah</i> .	Produk yang diteliti berbeda, peneliti tersebut meneliti mengenai pembiayaan takeover, yang tidak sah karena tidak terpenuhinya persyaratan dalam akad <i>kafālah</i> , yaitu dilakukan tanpa kehadiran dan tanpa sepengetahuan

		<i>makfūl lahu</i> (lembaga yang bersangkutan). Sementara penulis meneliti mengenai produk pembiayaan multijasa BTN iB yang menggunakan akad <i>kafālah bil ujah</i> yang mana dalam ketentuan <i>ujrah</i> tersebut terdapat prosentase.
Muslimah Anna Sari D, Implementasi <i>Ujah</i> Pada Produk Pembiayaan Multijasa BTN iB Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada BTN Syariah Cabang Pekanbaru), UIN Suska Riau	Produk yang diteliti sama-sama mengenai pembiayaan multijasa BTN iB	Meneliti mengenai tugas bank sebagai penjamin dan pemberi dana pada pihak ketiga tidak ada (hilang), karena pada saat pencairan dana, dana langsung diberikan kepada nasabah (pihak kedua) bukan kepada pihak ketiga (instansi). Sementara penulis meneliti mengenai <i>ujrah</i> pada pembiayaan multijasa BTN iB yang menggunakan akad <i>kafālah</i> .
Jessie Sa'adatul Mardiyah, Pelaksanaan Pembiayaan <i>Ijārah</i> Multijasa di BPRS Harum Hikmah Nugraha Garut, UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Produk yang diteliti sama-sama mengenai pembiayaan multijasa	Akadnya yang digunakan pada produknya berbeda, peneliti tersebut meneliti pembiayaan multijasa yang menggunakan akad <i>ijārah</i> . Sedangkan penulis meneliti mengenai pembiayaan multijasa BTN iB yang menggunakan akad <i>kafālah bil ujah</i> .

## 2. Kerangka Pemikiran

Kegiatan usaha perbankan syariah dilakukan dengan menggunakan akad-akad muamalah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kata akad berasal dari kata *al-'aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau

menghubungkan. Akad merupakan pertemuan *ījāb* dan *qabūl* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.<sup>18</sup>

Menurut KHES Bab II Pasal 21, bahwa akad dilakukan berdasarkan 11 asas, yaitu:<sup>19</sup>

- a. *ikhtiyāri*/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b. amanah/menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.
- c. *ikhtiyāti*/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. *luzūm*/tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau *maisir*.
- e. saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f. *taswiyah*/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.

---

<sup>18</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 68.

<sup>19</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) BUKU II BAB II Tentang ASAS AKAD Pasal 2



- g. transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- h. kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- i. *taisīr*/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- j. itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- k. sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

Kemudian Pasal 26 KHES menentukan bahwa akad tidak sah apabila bertentangan dengan:<sup>20</sup>

- a. Syariat Islam
- b. Peraturan Perundang-undangan
- c. Ketertiban umum, dan/atau
- d. Kesusilaan

Selanjutnya Pasal 27 dan 28 disebutkan bahwa hukum akad terbagi dalam 3 kategori, yaitu:

- a. Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syaratnya.

---

<sup>20</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) BUKU II BAB III Pasal 26



- b. Akad yang fasid adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan muslihat.
- c. Akad yang batal adalah akad yang kurang rukun dan syarat-syaratnya.

Dari segi ada atau tidak adanya kompensansi, fiqh muamalah membagi lagi akad menjadi dua bagian, yakni akad *tabarru* dan akad *tijārah*.<sup>21</sup> Akad *tabarru* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Akad *tabarru* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Akad *tijārah* (*compensational contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Akad *tijārah* dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu *Natural Uncertainty Contracts (NUC)*, dan *Natural Certainty Contracts (NCC)*

*Natural Uncertainty Contracts (NUC)* adalah kontrak/akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. Tingkat returnnya bisa positif, negatif, atau nol. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. Kontrak-kontrak investasi ini secara *sunnatullah* (*by their nature*) tidak menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya tidak *fixed and predetermined*. Contoh-contoh NUC adalah sebagai berikut :

- a. *Musyārakah*

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, hlm. 66.

- b. *Muzāra'ah*
- c. *Musāqāh*
- d. *Mukhābarah*

*Natural Certainty Contract (NCC)* adalah kontrak/akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. *Cash flow*-nya bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad. Kontrak-kontrak ini secara *sunnatullah (by their nature)* menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya *fixed dan predetermined*. Yang termasuk dalam kategori ini adalah kontrak-kontrak yang berbasis jual-beli, upah-mengupah, dan sewa-menyewa, yaitu :

- a. Akad jual-beli (*al-bai', salam dan istishnā*)
- b. Akad sewa menyewa (*ijārah dan IMBT*)

Salah satu akad yang saat ini sedang dikembangkan pada produk bank syariah adalah produk dengan akad *kafālah*. Dimana perbankan sebagai lembaga penjamin terhadap nasabah akan memperoleh pendapatan berupa *fee* atau *ujroh* dari nasabah atas jasa yang diberikan bank tersebut. Fatwa Dewan Syariah N0.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafālah* menyatakan bahwasanya dalam akad *kafālah* penjamin dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan dan *kafālah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Sedangkan *kafālah* menurut istilah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kāfil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak

kedua atas yang ditanggung. Dalam pengertian lain, *kafālah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

*Kafālah* sebagai akad yang dipergunakan untuk produk jasa perbankan syariah disebutkan oleh UU No. 21 Tahun 2008 dalam pasal 19 ayat (1) dan (2) huruf i. Adapun pengertian *kafālah* versi UU No. 21 adalah, “akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan (*kafīl*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makfūl*).”

Dasar hukum *kafālah* dari al-Qur'an yaitu QS. Yusuf:72, Allah berfirman:

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".<sup>22</sup>

Ibn Abbas sebagaimana dikutip oleh al-Thabrani menafsirkan kata *al-za'im* dalam ayat tersebut dengan *al-kafīl*, yaitu penjamin. Senada dengan pendapat Ibn Abbas, al-Kalbai sebagaimana dikutip oleh al-Razi, juga berpendapat bahwa kata *al-za'im* maknanya adalah *kafīl*.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), hlm. 244.

<sup>23</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), hlm. 321.

Dalam as-Sunnah, Abu Umamah meriwayatkan bahwa Rasul saw, bersabda :

الرَّعِيْمُ غَارِمٌ.

“Penjamin itu bertanggung jawab”<sup>24</sup>

Adapun ijma’, secara garis besar kaum Muslimin sepakat bahwa *adh-Dhamān* (jaminan) adalah boleh, karena memang dibutuhkan oleh manusia dan guna membantu menghilangkan beban dari diri orang yang berutang.<sup>25</sup>

Upah atau *ujrah* merupakan pembayaran (upah kerja) yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan. Islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan. Pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.

Pemberian upah (*ujrah*) itu hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja, karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah.

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam

<sup>24</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Kitab ash-Shadaqat Bab al-Kafalah jilid II*, hlm. 804.

<sup>25</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 35.

tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Sebagaimana didalam al-Qur'an juga dianjurkan untuk bersikap adil dengan menjelaskan keadilan itu sendiri. Firman Allah SWT Q.S *Al-Thalaq* 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ  
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ  
فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ  
أُخْرَى ۚ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka imbalan kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”<sup>26</sup>

Dalilnya adalah sabda Nabi saw.,

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

“Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya mengering”<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), hlm. 559.

<sup>27</sup> Muhammad bin Isma'il, *Subul As-Salam Juz 3, Maktabah Musthafa Al-Babiy*, cet. IV, hlm. 81.

Upah yang diberikan kepada seseorang seharusnya sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya cukup juga bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar.

Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang multijasa, bahwa dalam kegiatan multijasa LKS dapat memperoleh imbalan jas (*ujrah*) atau *fee* harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase.

## **F. Langkah- Langkah Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, tentunya memerlukan langkah-langkah tertentu agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### **1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode penulisan yang digunakan dengan cara mengumpulkan, mengolah, menganalisa data dari hasil penelitian, mengenai faktor-faktor yang merupakan pendukung terhadap variabel-variabel yang diteliti.

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data kualitatif.

Data-data tersebut berupa:

- a. Data tentang pelaksanaan pembiayaan multijasa BTN iB

- b. Data tentang kebijakan bank dalam menentukan *ujrah* pada pembiayaan multijasa BTN iB
- c. Data tentang Hukum Ekonomi Syariah mengenai pembiayaan multijasa

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data, yaitu :

#### a. Data Primer

Yaitu data yang didapat dari sumber pertama, yaitu dari pihak yang ada di Bank Tabungan Negara KCPS Surapati Core Bandung. Adapun data yang dibutuhkan mengenai:

- 1) Data tentang pelaksanaan pembiayaan multijasa BTN iB
- 2) Data tentang kebijakan bank dalam menentukan *ujrah* pada pembiayaan multijasa BTN iB
- 3) Data tentang Hukum Ekonomi Syariah mengenai pembiayaan multijasa

#### b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari keikutsertaan, atau sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian. Seperti buku-buku, *website*, hasil penelitian yang berkaitan dengan penetapan *ujrah* pada akad *kafālah* dalam produk pembiayaan multijasa BTN iB.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Yaitu dengan melakukan pengumpulan data-data dan profil Bank Tabungan Negara KCPS Bandung.

b. Wawancara

Penulis juga melakukan wawancara dan komunikasi dengan staf karyawan maupun pimpinan Bank Tabungan Negara KCPS Bandung untuk mendapatkan input-input atau masukan-masukan yang berhubungan dan berguna dalam bidang yang akan diteliti sebagai bahan penulisan laporan ini. Adapun wawancara yang dibutuhkan mengenai :

- 1) Pelaksanaan pembiayaan multijasa BTN iB
- 2) Kebijakan bank dalam menentukan *ujrah* pada pembiayaan multijasa BTN iB

3) Studi Kepustakaan

Yaitu teknik pengolahan yang diambil dari berbagai literatur atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli, guna mendapatkan landasan teoritis tentang masalah yang diteliti.

## 5. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang diperoleh dari informan atau narasumber serta literatur yang terkait dengan penelitian.
- b. Mengklasifikasikan seluruh data yang masuk.
- c. Mengkaji data-data yang terpilih.



- d. Menghubungkan data dan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- e. Menarik kesimpulan terhadap data hasil dari penelitian.

